

PETA PROSES BISNIS



URGENSI PETA PROSES BISNIS

01

Reformasi Birokrasi

Arsitektur SPBE, indeks SPBE dan Sistem Kerja

02

Zona Integritas

SOP mengacu Probis, dan implementasinya

03

Sistem Kerja

Penerapan Sistem Kerja melalui evaluasi Probis/SOP

04

SPBE

Arsitektur SPBE, Indeks SPBE

05

Evaluasi Kelembagaan

merupakan salah satu alat mengukur efektifitas & efisiensi kelembagaan

DASAR HUKUM

UU No 30 Th 2014

Pasal 7 ayat (2) huruf h

Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban menyusun standar operasional prosedur pembuatan Keputusan dan/atau Tindakan

Pasal 49

Pejabat Pemerintahan sesuai dengan kewenangannya wajib menyusun dan melaksanakan pedoman umum standar operasional prosedur pembuatan Keputusan.

Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertuang dalam pedoman umum standar operasional prosedur pembuatan Keputusan pada setiap unit kerja pemerintahan. Pedoman umum standar operasional prosedur pembuatan Keputusan wajib diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan kepada publik melalui media cetak, media elektronik, dan media lainnya.

Pasal 80 - 81

Pejabat Pemerintahan yang melanggar ketentuan tersebut dikenakan sanksi hukuman ringan

PermenPANRB No 19 Th 2018

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit

-3-

organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.

Pasal 2

Penyusunan Peta Proses Bisnis merupakan acuan bagi instansi pemerintah untuk menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.

PermenPANRB No 7 Th 2022

Pasal 22

(2) Penyusunan Sistem Kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 samai dengan 21, Instansi Pemerintah melakukan perbaikan dan pengembangan **Proses Bisnis**.

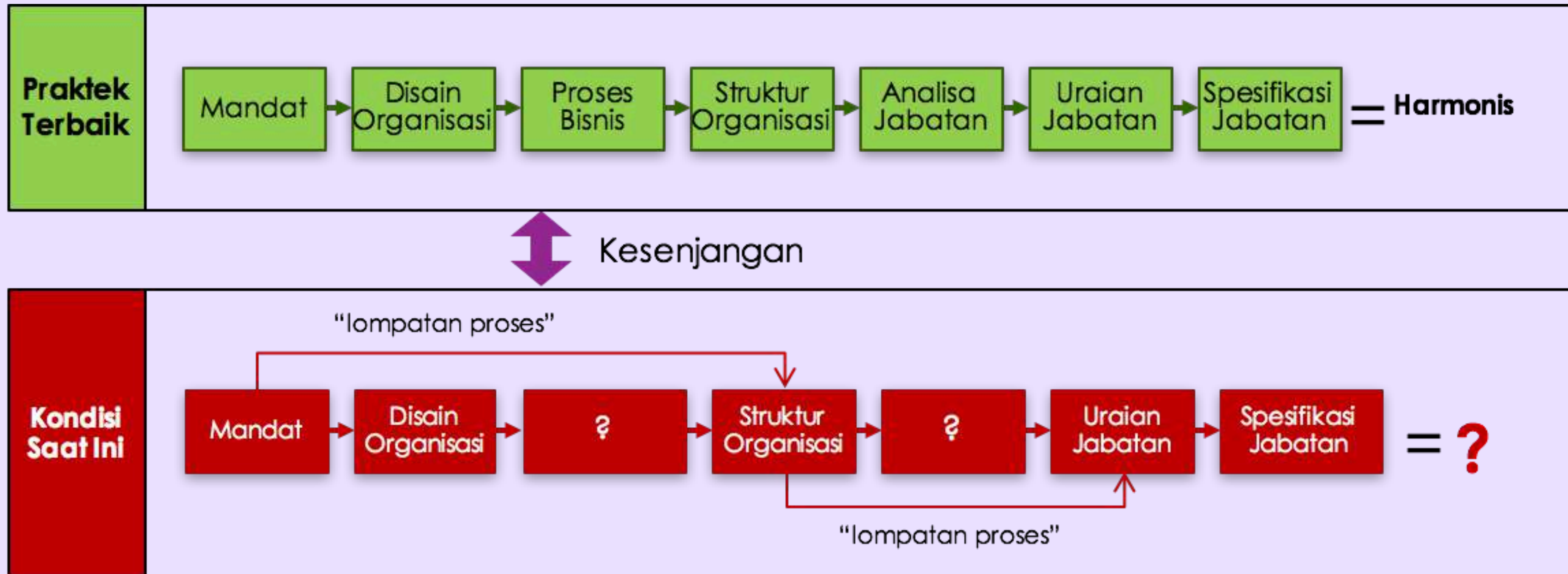
(3) **Perbaikan dan pengembangan melalui reviu dan evaluasi dapat dilakukan dengan penyesuaian standar operasional prosedur**

SE MenPANRB No 15 Th 2023

Kategori	Nilai	Konversi	Tingkat Penerapan
I	5	100%	telah menetapkan sistem kerja di lingkungan instansinya, menerapkan <i>squad team</i> , serta melakukan perbaikan dan pengembangan proses bisnis dan/atau penyesuaian Standar Operasional Prosedur (SOP).
II	4	80%	telah menetapkan sistem kerja di lingkungan instansinya dan menerapkan <i>squad team</i>
III	3	60%	telah menetapkan sistem kerja di lingkungan instansinya
IV	2	40%	sedang dalam penyusunan draft pengaturan sistem kerja di lingkungan instansinya
V	1	20%	telah terdapat dokumen yang menyatakan akan dilakukan penyusunan draft sistem kerja di lingkungan instansi
VI	0	0%	tidak melakukan PSO

Proses Bisnis

Untuk Menjaga Keselarasan, Konsistensi, dan Efektivitas Penyusunan Organisasi



1. Adanya "lompatan proses" pada praktek yang dilakukan selama ini;
2. Tanpa melakukan pemetaan bisnis proses dan analisis jabatan terlebih dahulu, cenderung menghasilkan uraian jabatan yang "seragam";
3. Uraian jabatan yang "seragam" akan menyulitkan dalam mengidentifikasi indikator kinerja (KPI) secara spesifik dan terukur;

01

Sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien

04

peta proses menjadi dokumen terintegrasi yang mudah diakses

02

Merupakan standar pelaksanaan pekerjaan

05

peta proses merupakan asset pengetahuan dalam pengambilan keputusan strategis

03

menggambarkan logika proses secara lebih eksplisit & kaya arti sehingga mudah dipahami

06

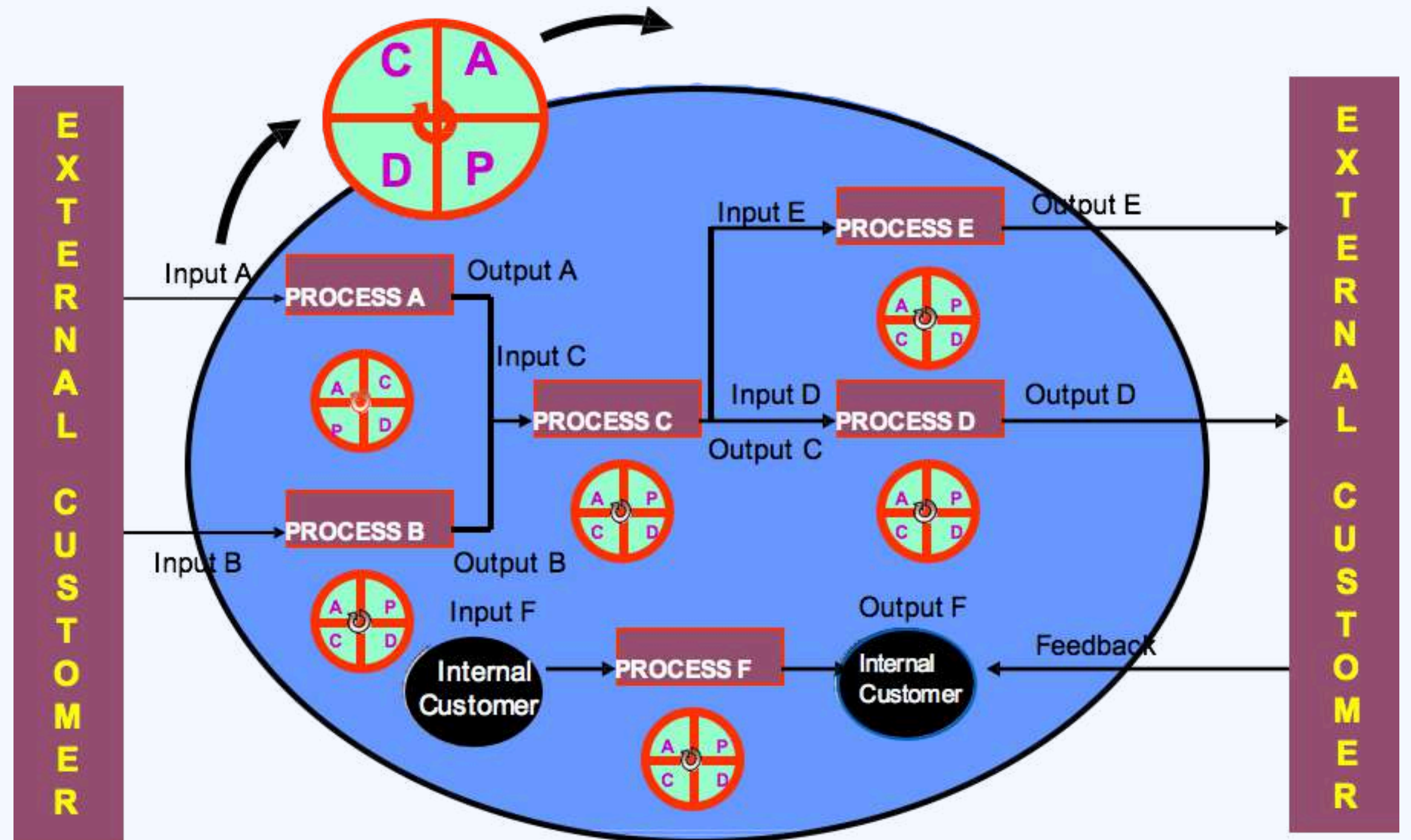
Dapat langsung diotomatisasi dan dieksekusi menggunakan aplikasi

**KELEBIHAN
DAN
KEUNTUNGAN
PROSES
BISNIS**

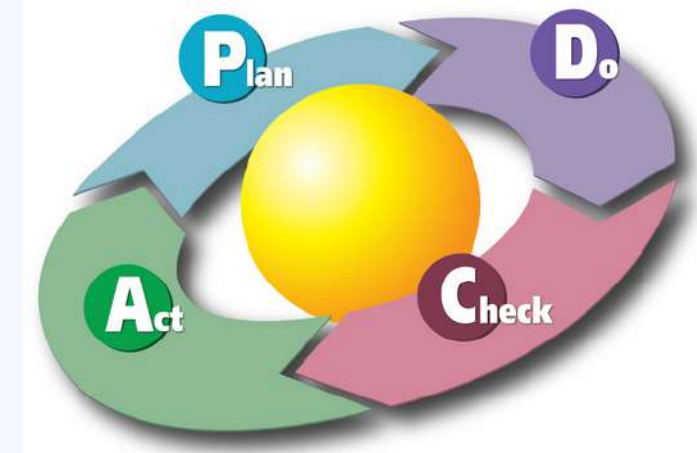
DEFINISI PROSES BISNIS

serangkaian **kejadian, aktivitas, dan pengambilan keputusan** yang dijalankan secara **berurutan dan saling terkait** dengan melibatkan sejumlah **aktor dan objek**, yang secara kolektif memberi hasil dan **dampak yang bermanfaat/bernilai tambah** bagi setidaknya satu pengguna.

Diagram yang menggambarkan **hubungan kerja** yang efektif & efisien **antar unit organisasi** untuk menghasilkan kinerja **sesuai dengan tujuan** pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yg **bernilai tambah** bagi pemangku kepentingan



TAHAPAN PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS

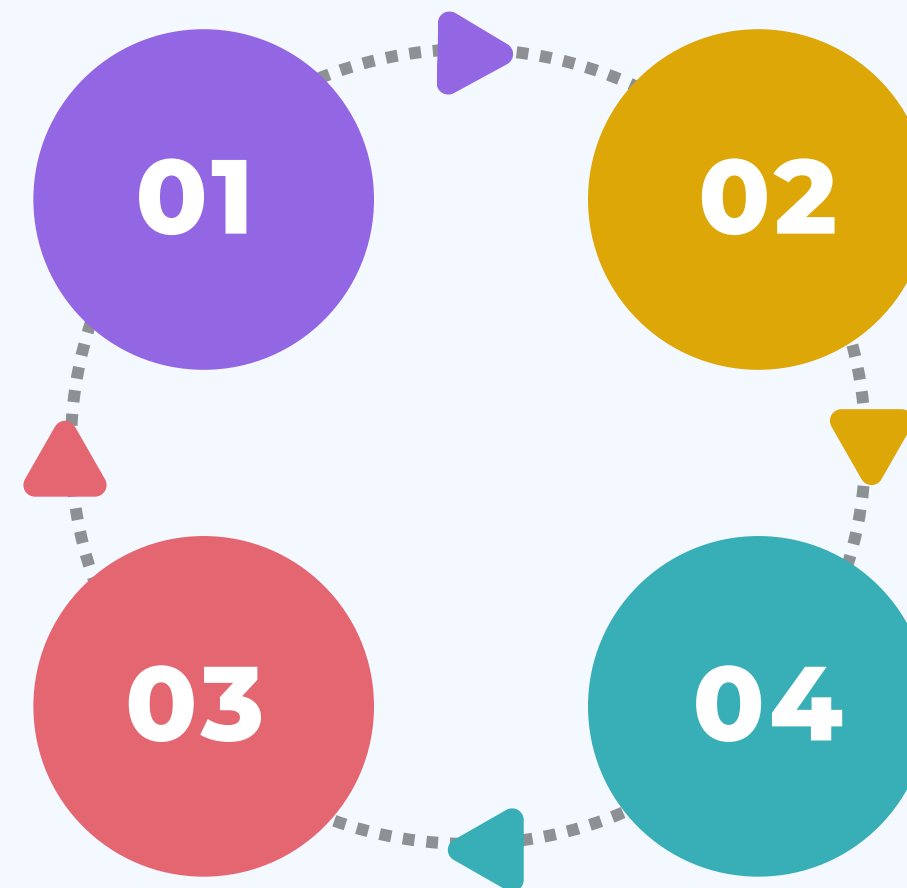


Persiapan dan Perencanaan

1. Pengumpulan informasi
2. Pengorganisasian

Pemantauan dan Evaluasi

Memastikan implementasi peta probis yang memicu kinerja



Pengembangan

1. Pemetaan Proses Bisnis menggunakan level/tingkatan
2. Pemetaan Proses Bisnis menggunakan jenis gambar

Penerapan/Implementasi

1. Pengesahan proses bisnis
2. Pendistribusian proses bisnis
3. Penyimpanan, penempatan dan pemanfaatan proses bisnis
4. Perubahan proses bisnis

Tahap Persiapan dan Perencanaan

01

Tahap Pengumpulan Informasi

- Tahap pengumpulan informasi terdiri dari informasi primer (wawancara) dan informasi sekunder (dokumen renstra, SOTK, peraturan lainnya).

02

Tahap Pengorganisasian

- Seluruh tahapan proses penyusunan peta proses bisnis instansi pemerintah dilakukan oleh kelompok kerja yang terintegrasi dalam tim Reformasi Birokrasi Internal (RBI) masing-masing instansi pemerintah yang dipimpin oleh pimpinan instansi pemerintah
- secara struktural dan fungsional tugas penyusunan peta proses bisnis instansi pemerintah dilakukan oleh unit organisasi yang menangani urusan di bidang tata laksana

SIPOC - pengumpulan informasi



TAHAPAN PENGEMBANGAN

KERANGKA PETA PROBIS MENGGUNAKAN LEVEL

Penyusunan peta probis dimulai dari visi, misi, dan tujuan yang kemudian diturunkan ke dalam fungsi dan proses bisnis untuk mencapainya.

 **Level atau tingkatan BPM N**

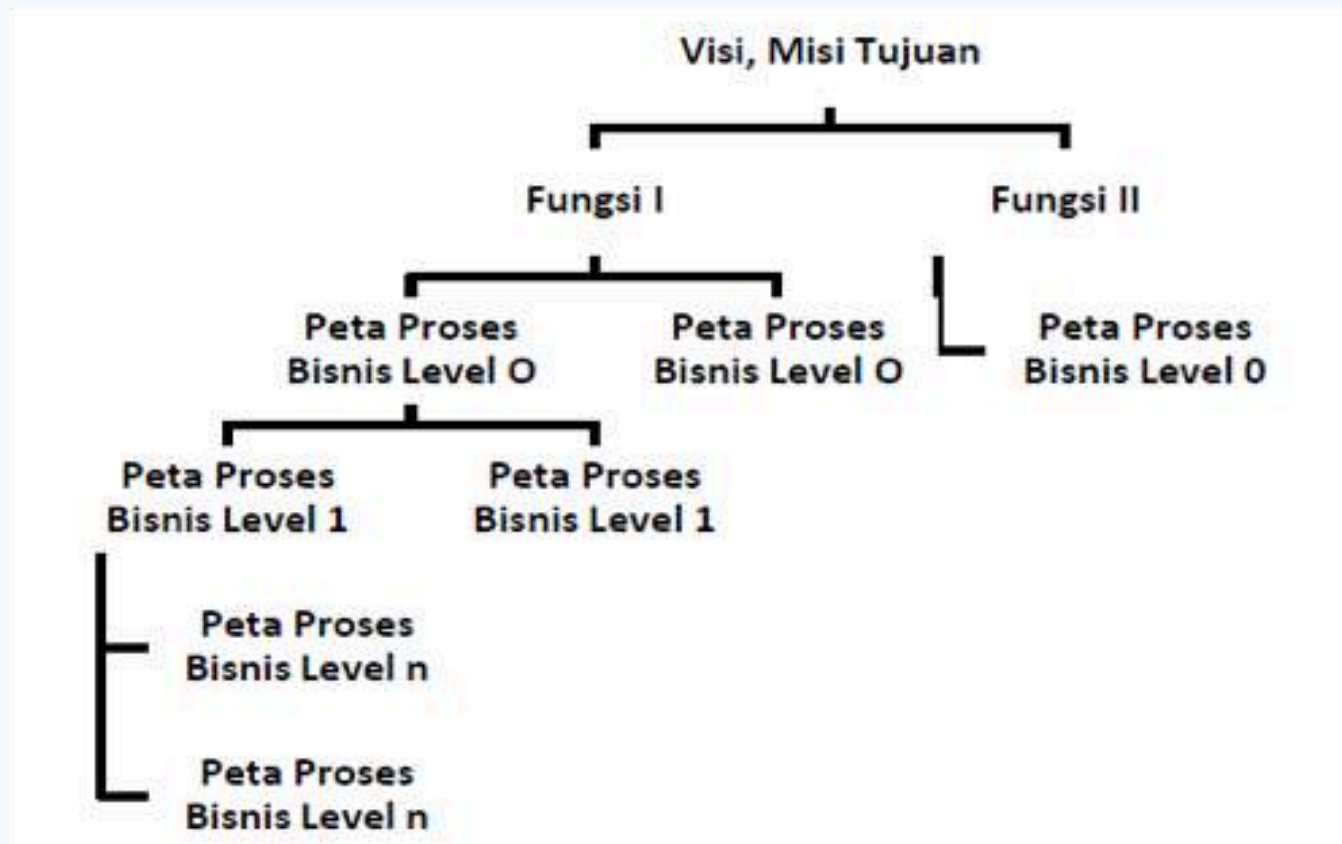
beberapa **level atau tingkatan** (level 0, level 1, level 2, dan selanjutnya)

FLOWCHART 

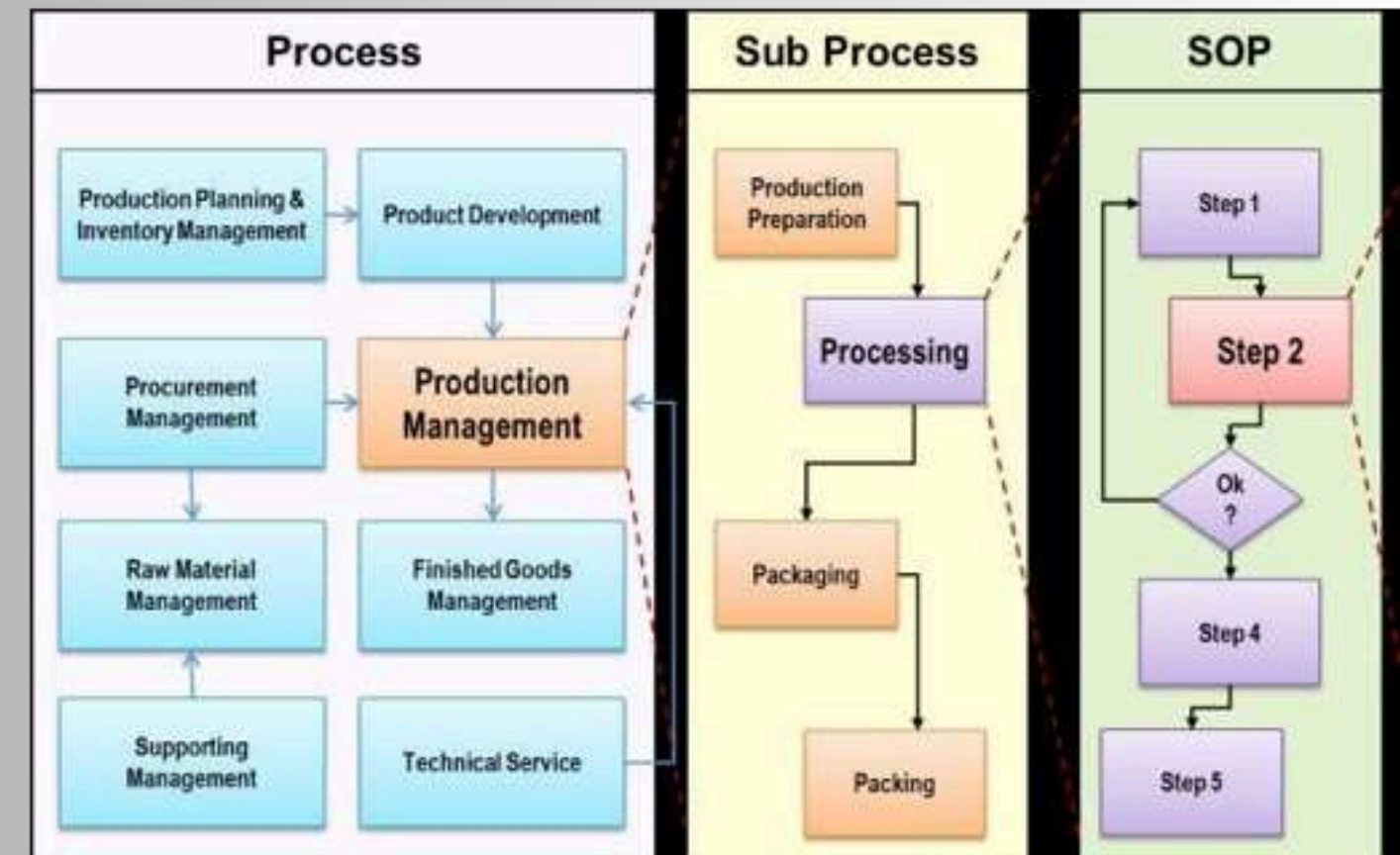
KERANGKA PETA PROBIS MENGGUNAKAN GAMBAR

Peta proses bisnis yang digambarkan dalam beberapa jenis gambar.

jenis gambar peta yaitu **peta proses, subproses, relasi, dan lintas fungsi.**



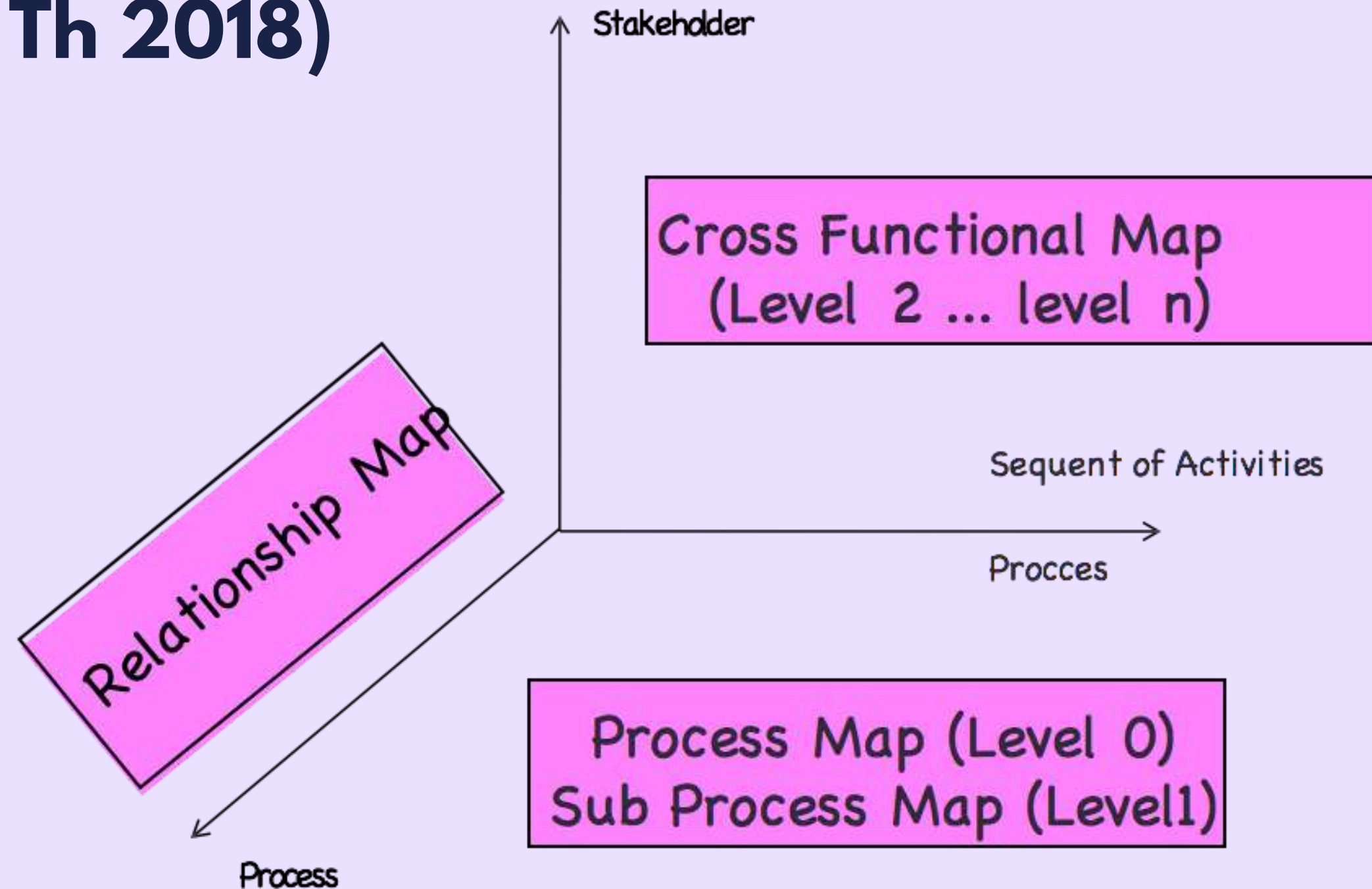
Peta Proses Bisnis



KERANGKA PROSES BISNIS (PermenPANRB No 19 Th 2018)

Peta Proses Bisnis terdiri dari:

1. Peta proses (level 0) - KBM.01
2. Peta Relasi - KBM.01
3. Peta Sub Proses (level 1) - KBM.01.01
4. Peta Lintas Fungsi (Level n) - KBM.01.01.CFM.01
5. dst



KLASIFIKASI PROSES BISNIS INSTANSI PEMERINTAH

PROSES UTAMA

01

Proses yang menciptakan aliran nilai utama

- berperan langsung dalam memenuhi kebutuhan pengguna eksternal dan internal instansi pemerintah
- Berpengaruh langsung terhadap keberhasilan instansi pemerintah dalam mencapai visi, misi, dan strategi organisasi
- Memberikan respon langsung terhadap permintaan dan memenuhi kebutuhan pengguna

PROSES MANAJEMEN PENDUKUNG

02

Proses untuk mengelola operasional dan manajemen dari suatu sistem dan memastikan proses inti berjalan dengan baik.

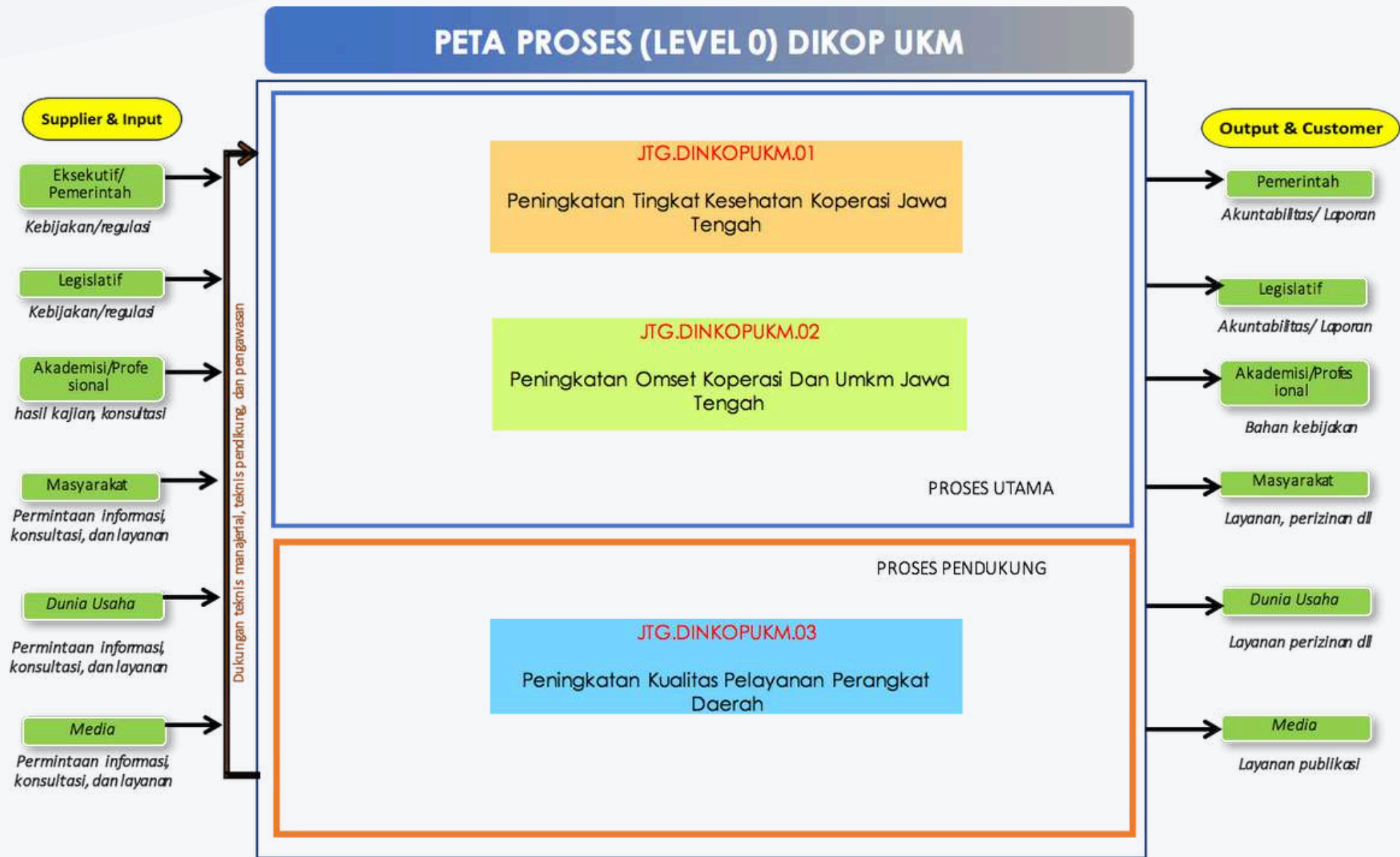
- Memenuhi kebutuhan pengguna internal
- Memberikan dukungan atas aktivitas pada proses inti

PROSES LAINNYA

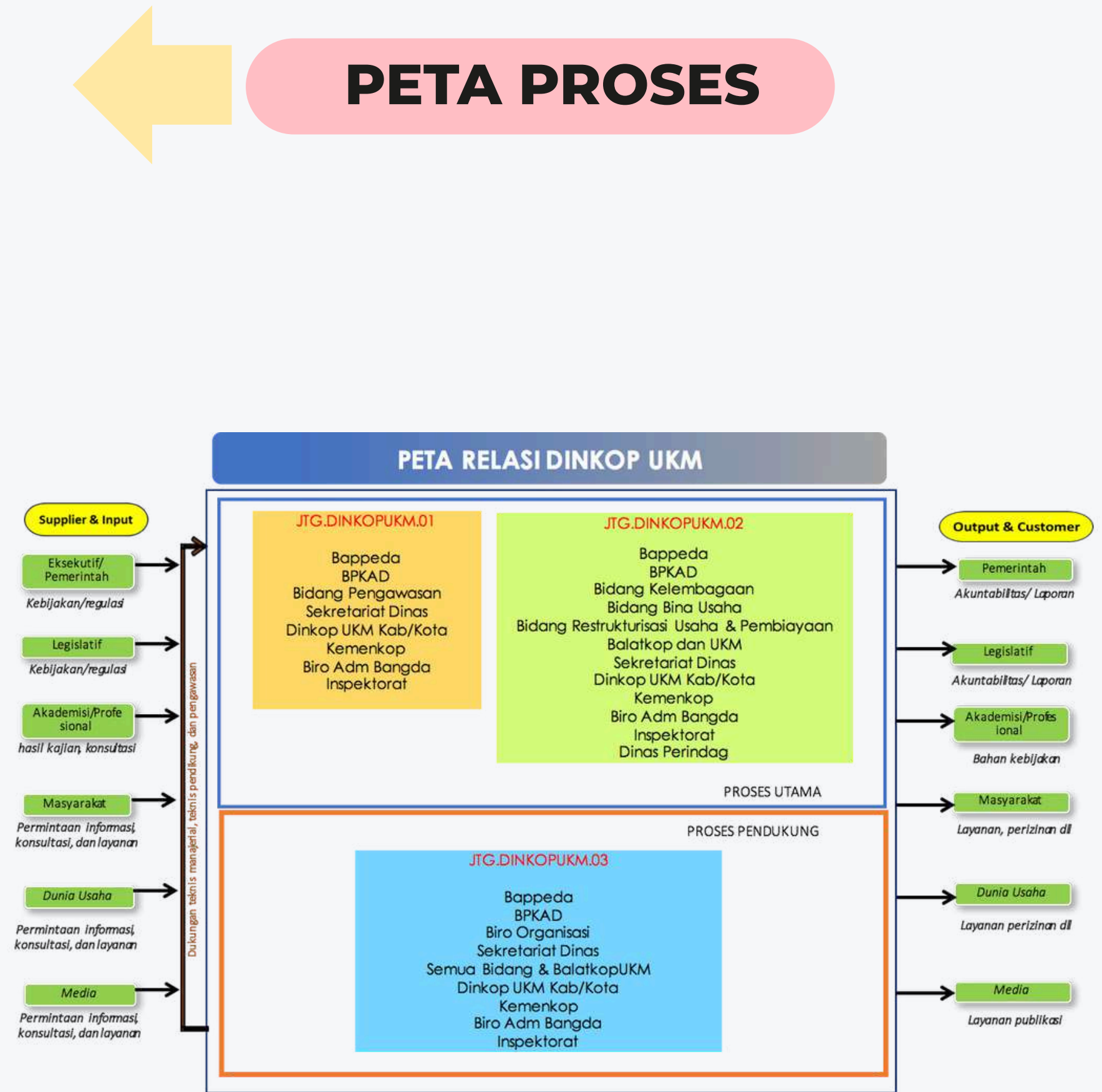
03

Merupakan proses yang tidak memiliki kaitan langsung dengan proses inti namun menghasilkan nilai manfaat bagi pemangku kepentingan eksternal. Proses lainnya memiliki kriteria yang memungkinkan aktivitas pada proses berjalan lebih optimal.

METODE FLOWCHART



PETA RELASI



PETA PROSES

METODE FLOWCHART

PETA SUB PROSES (LEVEL 1)



PETA SUB PROSES

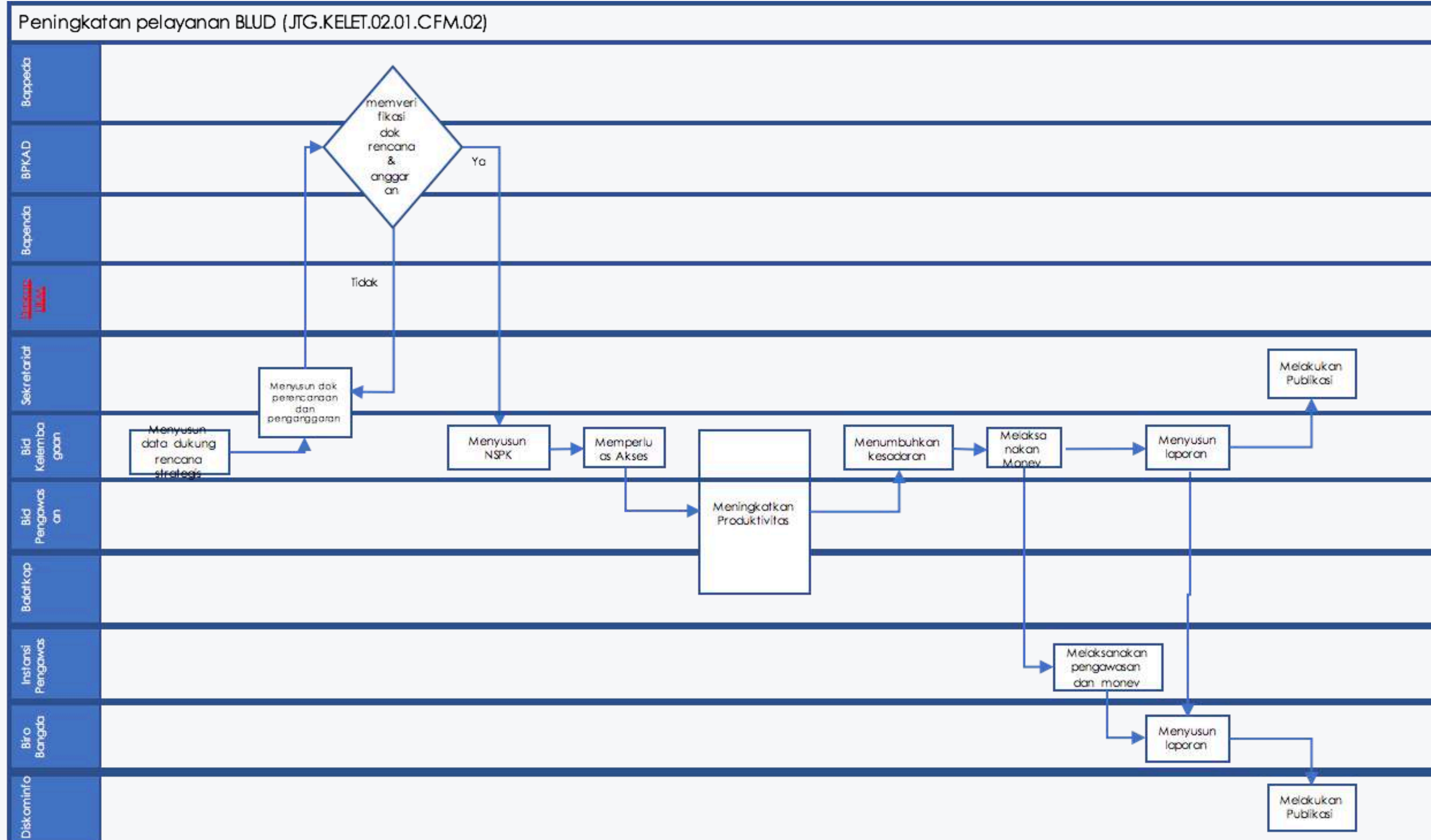
PETA SUB PROSES (LEVEL 1)



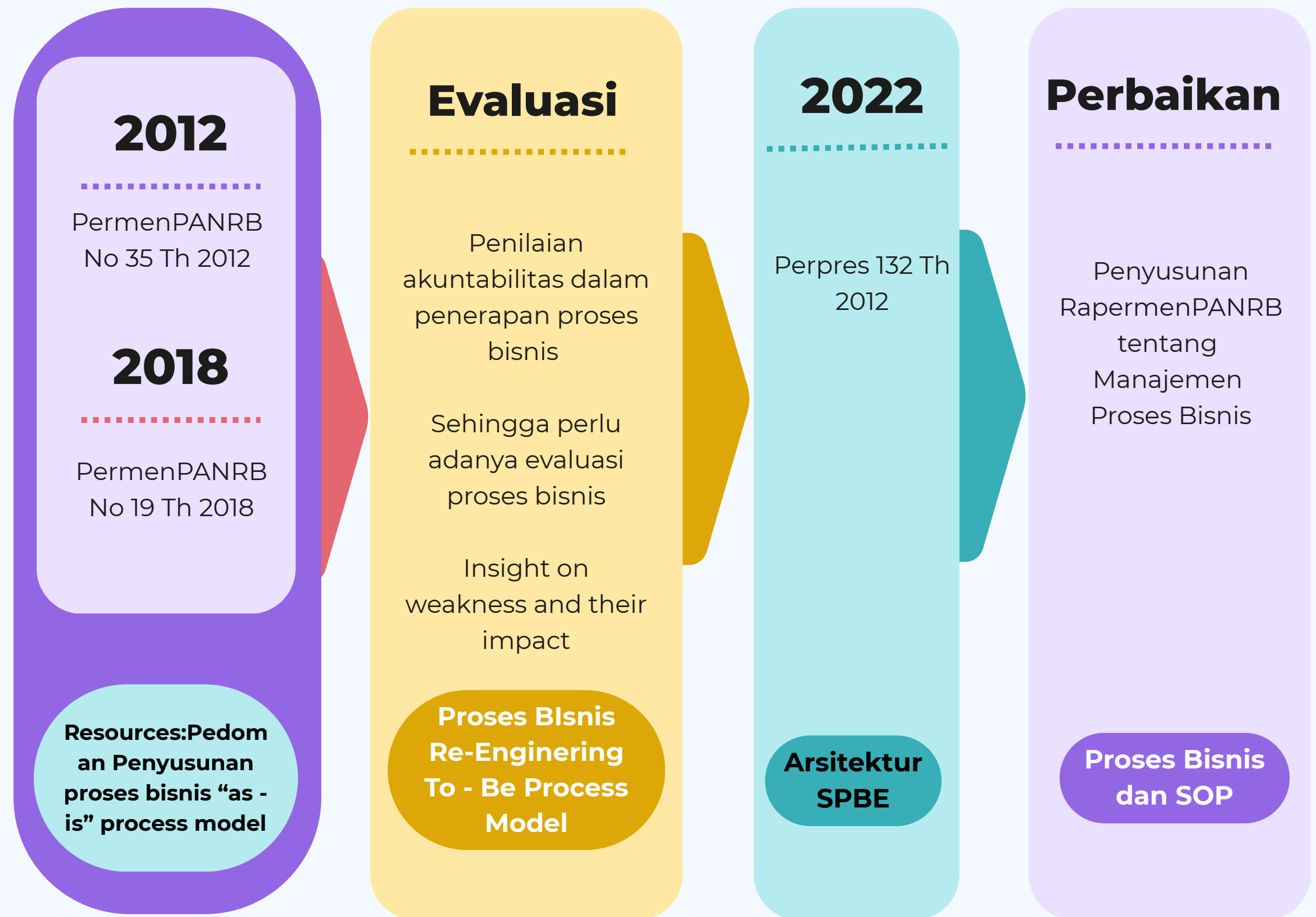
PETA SUB PROSES

PETA LINTAS FUNGSI (CFM)

PETA LINTAS FUNGSI



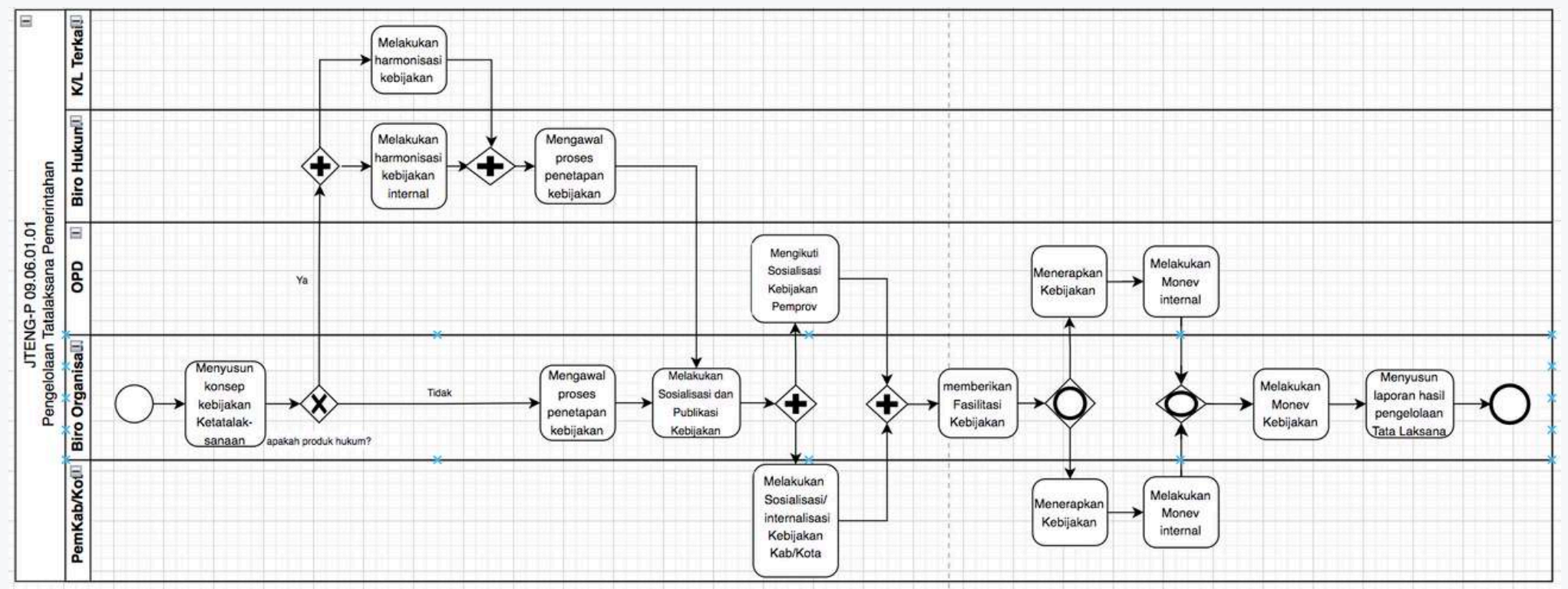
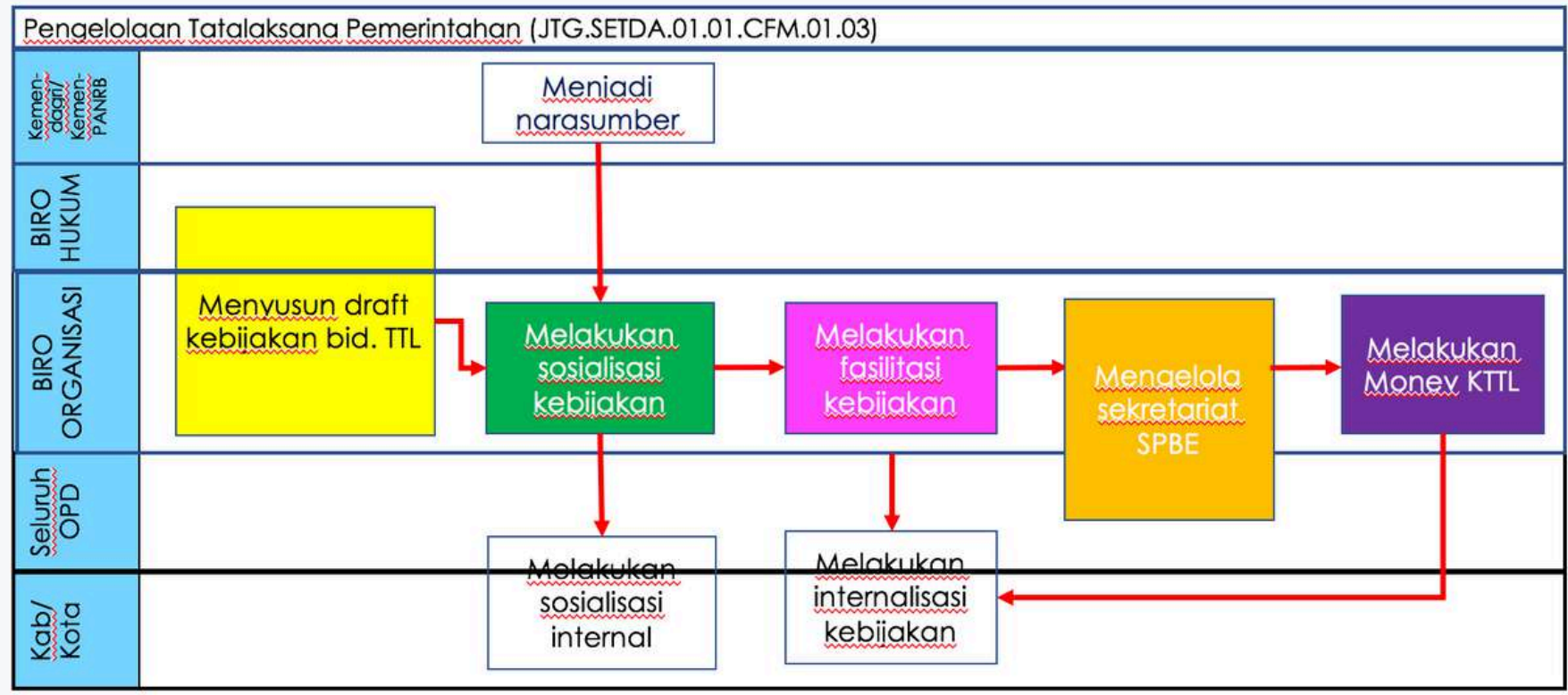
KERANGKA PERUBAHAN PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS MELALUI MANAJEMEN PROSES BISNIS



TRANSFORMASI FORMAT DIAGRAM ALIR KE BPMN

Seiring dengan perkembangan proses bisnis yang semakin kompleks, penggunaan **notasi** dalam desain diagram alir proses (process flow chart) menghadapi keterbatasan.

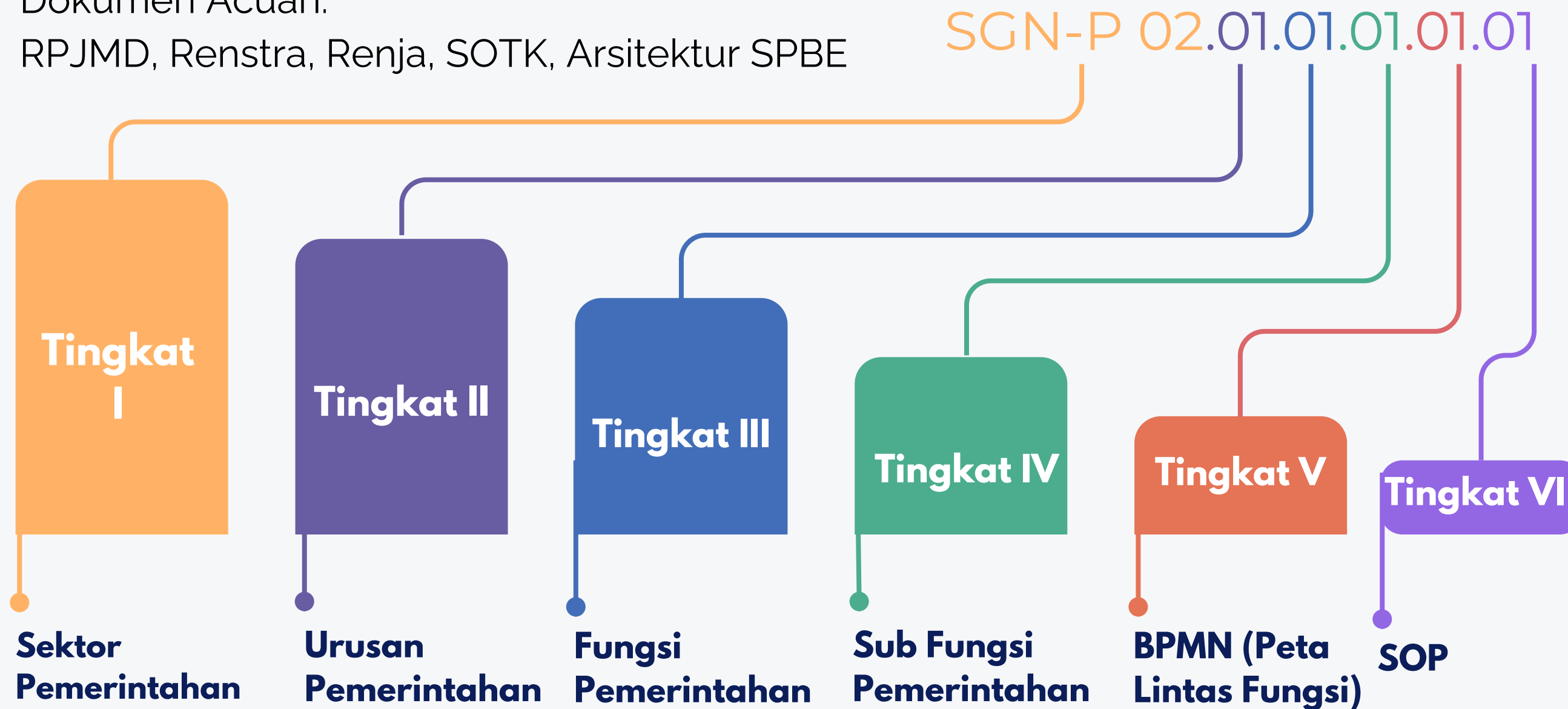
BPMN hadir dengan notasi yang memiliki kemampuan yang **fleksibel** untuk membantu perusahaan dalam menghadapi keterbatasan tersebut. **BPMN** memiliki notasi grafis standar yang dapat **mempermudah pemahaman** terhadap kinerja kolaborasi dan transaksi bisnis di dalam dan antar organisasi.



KERANGKA HIERARKI PEMODELAN PROSES BISNIS (Manajemen Proses Bisnis)

Dokumen Acuan:

RPJMD, Renstra, Renja, SOTK, Arsitektur SPBE



KODEFIKASI INSTANSI

Lima huruf pertama dalam kapital

- Penambahan kode "U" untuk proses utama
- Penambahan kode "P" untuk proses pendukung
- Penambahan kode "L" untuk proses lainnya

CONTOH

Pemerintah Kabupaten Sragen dapat menggunakan kode SNG.

Contoh Penulisan:

SGN-P 02.01.01.01.01

SGN-P 09.06.01.01.01

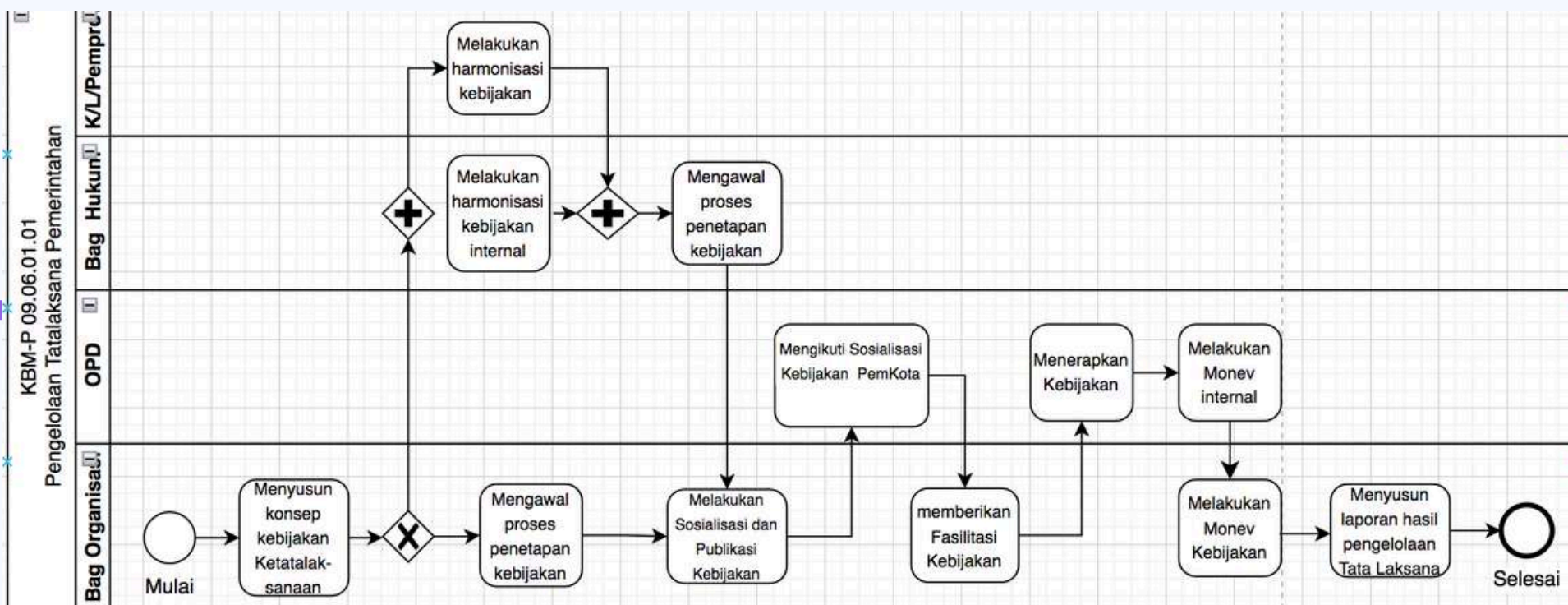
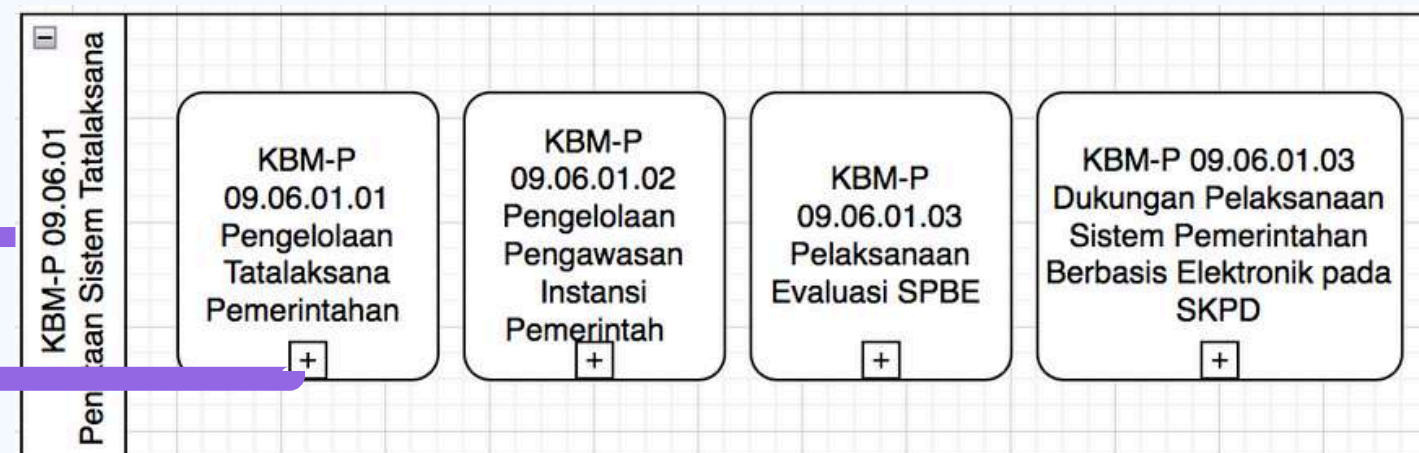
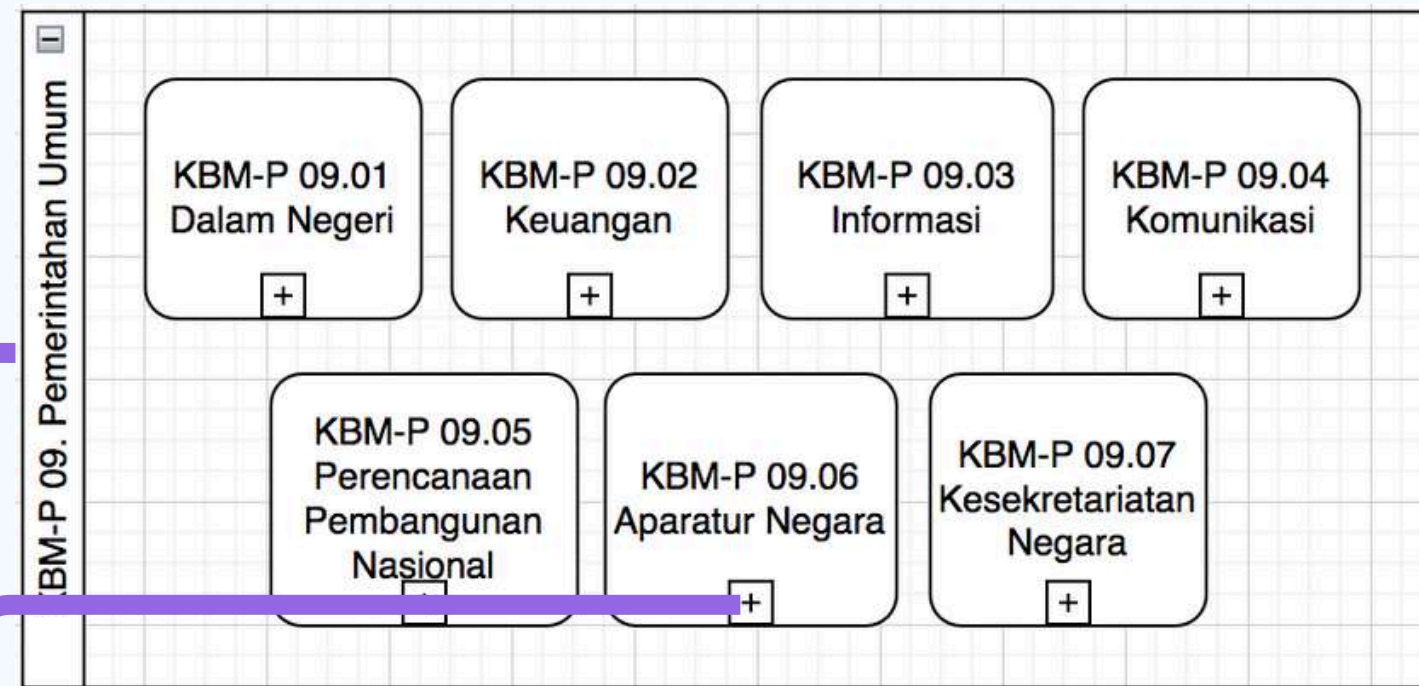
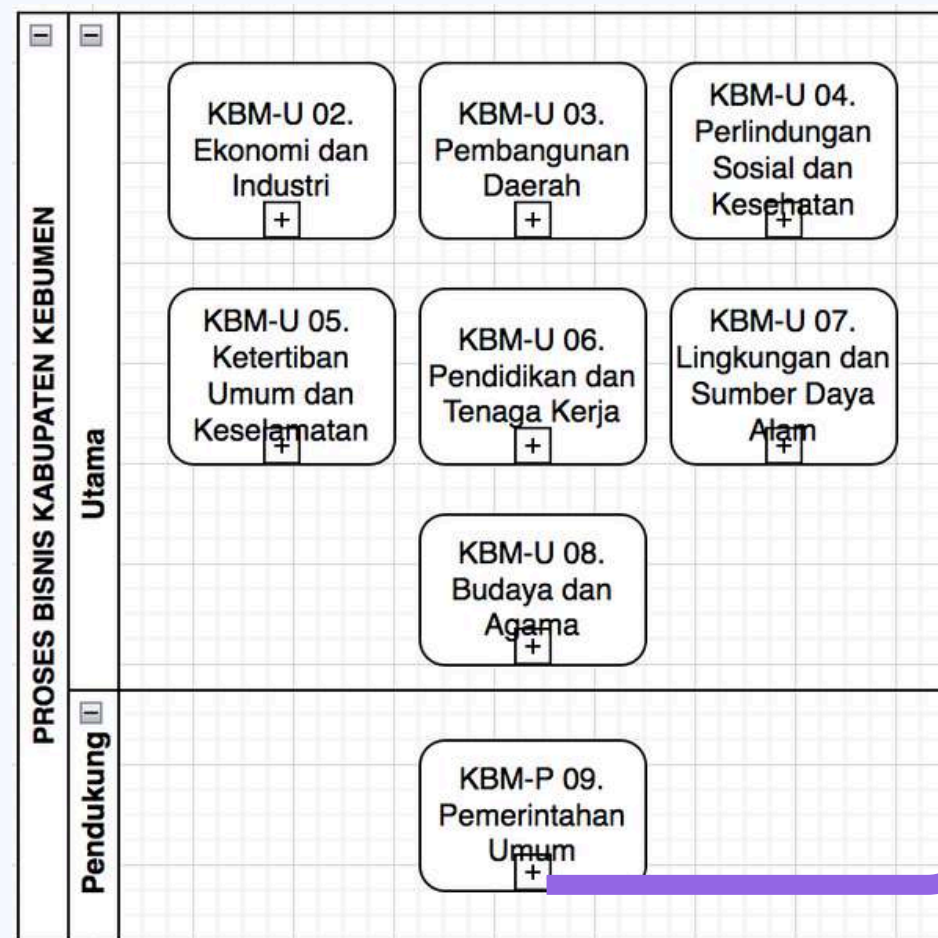
KERANGKA PENATAAN PROSES BISNIS PEMERINTAHAN (Manajemen Proses Bisnis)

Sektor Pemerintahan RAB Level 1	Urusan Pemerintahan RAB Level 2	Fungsi Pemerintahan RAB Level 3	Sub Fungsi Pemerintahan RAB Level 4	BPMN	SOP
RAB.01 - Pertahanan dan Luar Negeri	RAB.01.01 - Pertahanan RAB.01.02 - urusan luar negeri	<p style="text-align: center;">Menyesuaikan dengan RAB Level 3 pada Arsitektur SPBE</p>			
RAB.02 - Ekonomi dan Industri	RAB.02.01 - industri RAB.02.02 - perdagangan RAB.02.03 - pertanian RAB.02.04 - perkebunan RAB.02.05 - Peternakan RAB.02.06 - perikanan RAB.02.07 - badan usaha milik negara RAB.02.08 - investasi RAB.02.09 - koperasi RAB.02.10 - usaha kecil dan menengah RAB.02.11 - pariwisata				
RAB.03 - Pembangunan Daerah	RAB.03.01 - pekerjaan umum RAB.03.02 - transmigrasi RAB.03.03 - transportasi RAB.03.04 - perumahan RAB.03.05 - pembangunan kawasan atau daerah tertinggal				
RAB.04 - Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.01 - kesehatan RAB.04.02 - sosial RAB.04.03 - pemberdayaan perempuan				
RAB.05 - Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAB.05.01 - hukum RAB.05.02 - keamanan RAB.05.03 - hak asasi manusia				
RAB.06 - Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.01 - pendidikan RAB.06.02 - ketenagakerjaan RAB.06.03 - ilmu pengetahuan RAB.06.04 - teknologi RAB.06.05 - pemuda				
RAB.07 - Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAB.07.01 - pertambangan RAB.07.02 - energi RAB.07.03 - kehutanan RAB.07.04 - kelautan RAB.07.05 - lingkungan hidup				
RAB.08 - Budaya dan Agama	RAB.08.01 - agama RAB.08.02 - kebudayaan RAB.08.03 - olahraga				
RAB.09 - Pemerintahan Umum	RAB.09.01 - dalam negeri RAB.09.02 - keuangan RAB.09.03 - informasi RAB.09.04 - komunikasi RAB.09.05 - perencanaan pembangunan nasional RAB.09.06 - aparaturnegara RAB.09.07 - kesekretariatan negara RAB.09.08 - pertanahan RAB.09.09 - kependudukan				

KERTAS KERJA

Level 1	: Pemerintahan Umum (09)		
Level 2	: Aparatur Negara (09.06)		
Level 3	: Penataan Sistem Tatalaksana (09.06.01)		
Level 4	: Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan (09.06.01.01)		
NO	KEGIATAN	LAYANAN	OUTPUT (DATA DAN INFORMASI)
1	2	3	4
1	Menyusun konsep kebijakan ketatalaksanaan	-	Konsep Kebijakan Bidang TTL (Pergub dan Kepegub)
2	Mengawal Proses Penetapan Kebijakan		Kebijakan Ketatalaksanaan (SE)
3	Melakukan sosialisasi dan publikasi kebijakan		Dok. Laporan sosialisasi
4	Memberikan fasilitasi ketatalaksanaan	Layanan Fasilitasi ketatalaksanaan	Dok.Rekap Laporan fasilitasi, Dok Hasil Reviu Konsep Kebijakan Ketatalaksanaan Kab/Kota
5	Melakukan monitoring dan evaluasi penerapan kebijakan bid TTL		Dokumen Laporan hasil monev
6	Menyusun Laporan Hasil Pengelolaan Tatalaksana		Data Peta Proses Bisnis OPD dan Kab/Kota, Data SOP OPD dan Kab/Kota, Dokumen laporan Hasil Pengelolaan Tatalaksana

PROSES BISNIS PEMERINTAHAN



PEMBAGIAN TUGAS DALAM PENGELOLAAN PROSES BISNIS

Pengelolaan Peta Proses Bisnis merupakan tugas seluruh perangkat daerah tanpa terkecuali yang dikoordinasikan oleh Bagian Organisasi (yang membidangi ketatalaksanaan).



BAGIAN ORGANISASI

- Melakukan sosialisasi,
- Mengkoordinasikan dan melakukan pendampingan penyusunan peta proses bisnis
- Mengkompilasi dan menyiapkan penetapan peta proses bisnis
- Melakukan monev dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Daerah untuk diteruskan kepada Kementerian PANRB



SELURUH OPD

- Melakukan identifikasi proses level 4 berdasarkan referensi
- Menyusun BPMN
- Menyusun SOP
- Melaporkan hasilnya pada Bagian Organisasi



DISKOMINFO

Bertanggungjawab terhadap input proses bisnis pada SIA-SPBE



BAPPERIDA

Melakukan verifikasi hasil identifikasi proses level 4 oleh OPD

TAHAPAN MANAJEMEN PROSES BISNIS

Pendetailan proses saat ini

Menemukenali proses dengan mengumpulkan informasi dilanjut dengan mendokumentasikan kondisi terkini setiap proses bisnis yang ada menggunakan notasi BPMN

Analisis Proses Saat ini

mengidentifikasi, mendokumentasi, dan merangkum seluruh permasalahan yang terjadi pada proses bisnis yang ada

Rancang Ulang Proses Saat ini

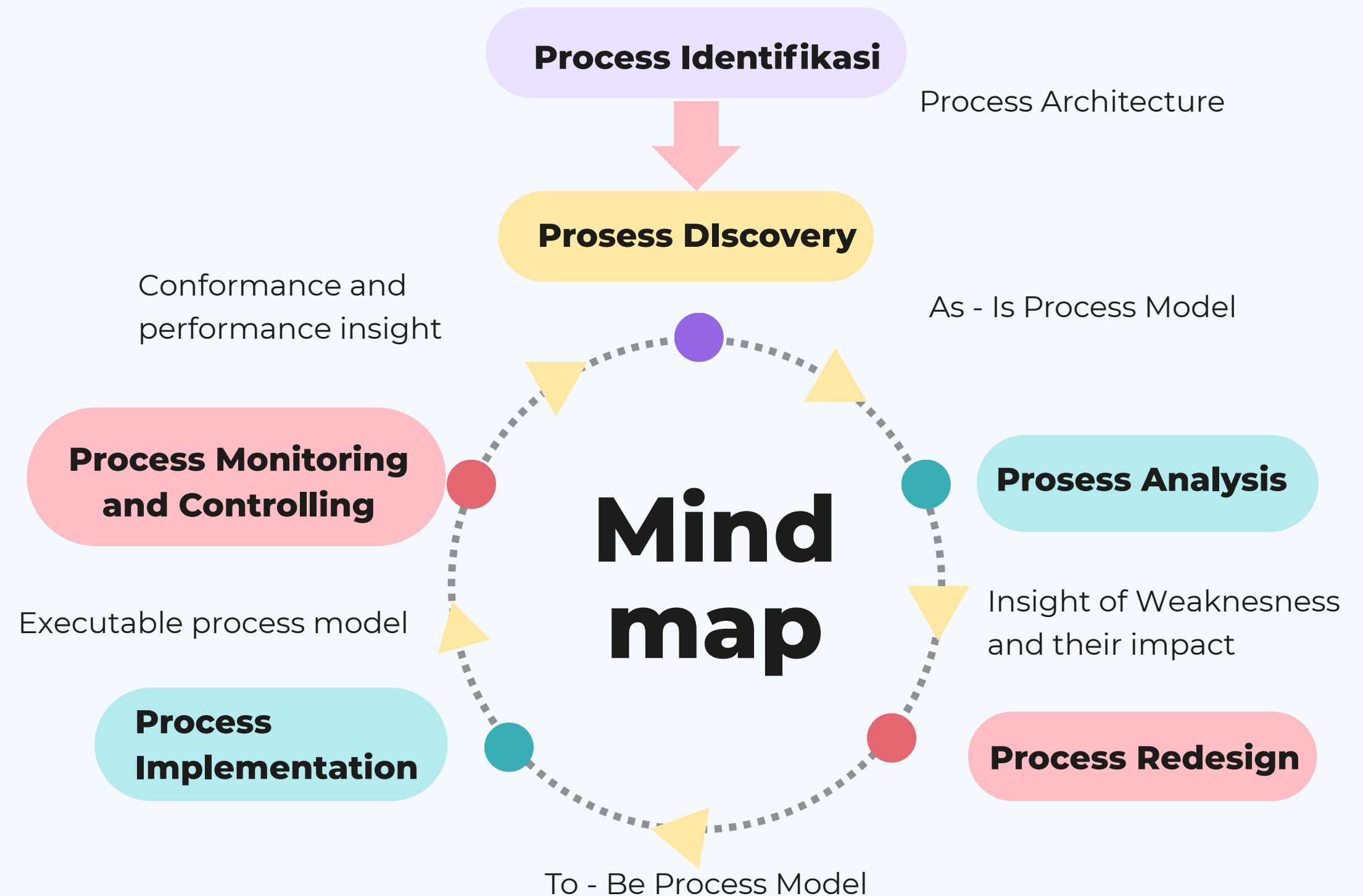
mengidentifikasi perbaikan pada proses sehingga memungkinkan organisasi mencapai target kinerja yang diharap

Implementasi Proses Baru

menjalankan solusi perbaikan/peningkatan yang akan memperbaiki kinerja proses bisnis saat ini

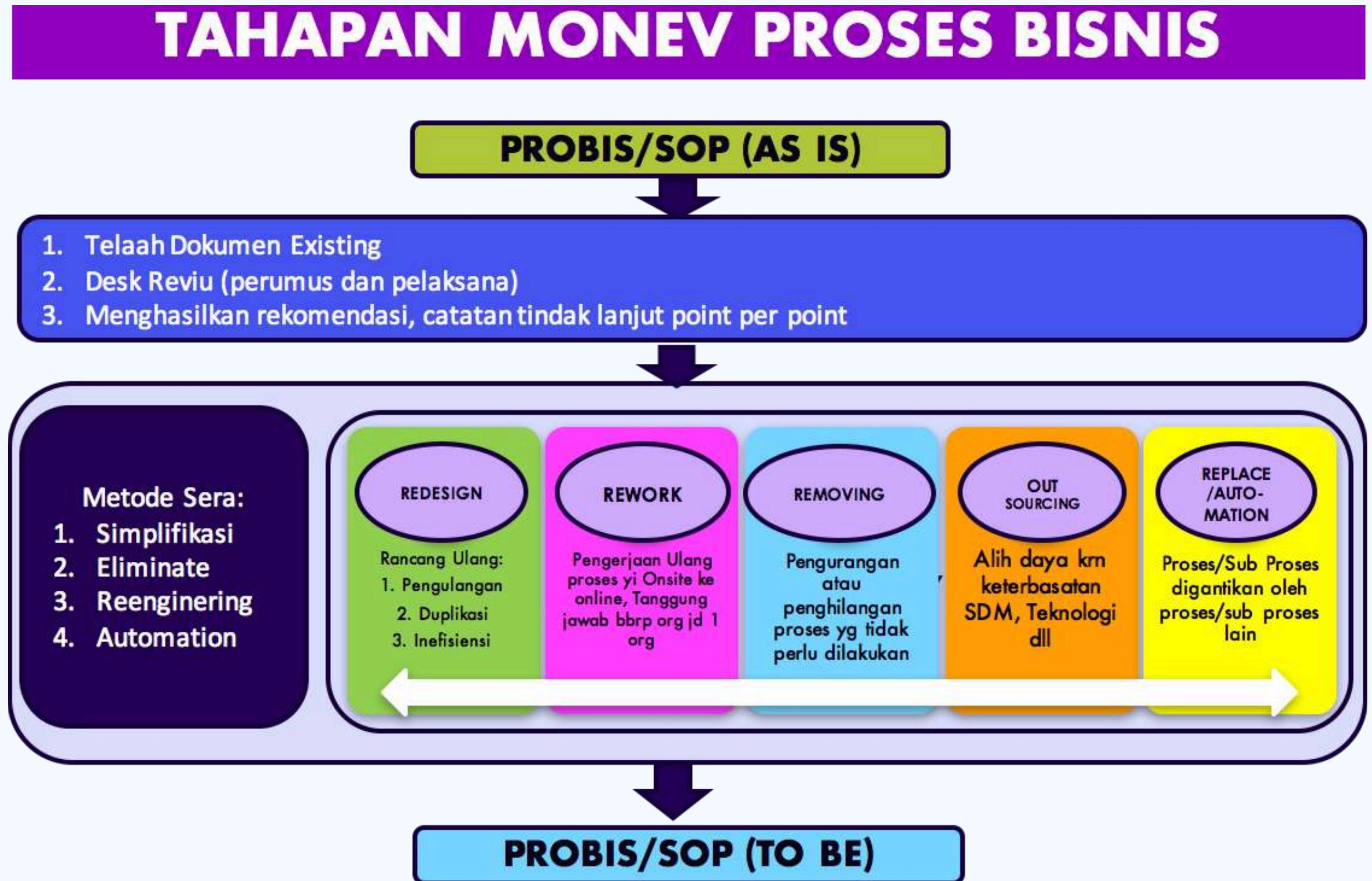
Pemantauan Proses Baru

mengukur kinerja proses bisnis baru sambil melakukan perbaikan secara terus-menerus untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses bisnis baru.



PERUBAHAN PROSES BISNIS

- karena terjadinya perubahan arah strategis instansi pemerintah (visi, misi, dan strategi) yang mengakibatkan perubahan tugas dan fungsi serta keluaran unit organisasi;
- adanya kebutuhan/dorongan internal maupun dari masyarakat untuk memperbaiki kinerja pelayanan publik;
- hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses bisnis;
- inisiatif perubahan dari unit organisasi; dan
- umpan balik dari hasil evaluasi





THANK
YOU